

Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wahyu Haryadi¹, Kamaruddin², Hamdani³

1. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

2. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

3. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

E-mail: wahyuharyadi@universitas-samawa.ac.id,

kamaruddin@universitas-samawa.ac.id

Hamdani371@yahoo.co.id,

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Mataram. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan jenis data yang digunakan ada dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber datanya dalam penelitian ini adalah data sekunder (time series) selama periode tahun 2008-2018, dimana datanya berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik studi pustaka. Alat analisis yang digunakan yaitu teknik analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Hipotesis, Uji Koefisien Determinasi, Uji Koefisien Korelasi. Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi linier sederhana yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y) = 5.551.854.013,648 + 4,807PKB Uji Signifikan hasilnya adalah $t_{hitung} = 11,696$ dan $t_{tabel} = 1,833$, sehingga nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koefisien Determinasi (R Square) hasilnya adalah 93,8% perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipengaruhi oleh Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi NTB, dan sisanya 6,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil dari uji koefisien korelasi adalah nilai R = 0,969 yang artinya bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi NTB memiliki korelasi yang signifikan atau memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 96%.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah yang berasal dari pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor itu sendiri menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa

untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan secara khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak miliki kendaraan bermotor tersebut.

Dimana dengan telah tersedianya berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh BAPPENDA seperti; melalui kantor induk samsat keliling, e-samsat melalui Bank NTB, hingga yang terbaru adalah samsat on call sebagai bentuk usaha untuk melayani wajib pajak, dalam rangka mengumpulkan biaya pembangunan daerah. Dimana Samsat on call sendiri merupakan fasilitas layanan samsat yang disediakan bagi wajib pajak yang akan jatuh tempo H-1 dan tidak mempunyai kesempatan mendatangi tempat pelayanan terdekat karena berbagai sebab seperti faktor kesibukan, sakit atau sedang berada di luar daerah. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu untuk mempermudah kewajiban dalam membayar pajak. Tetapi dalam realitanya ketaatan peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor ini masih terbilang kurang. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pajak

Istilah pajak sudah lama dikenal oleh masyarakat terutama kalangan para ahli negarawan dan para cendekiawan. Istilah pajak tidak begitu lazim digunakan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya. Hal ini disebabkan pajak sendiri hanya berhubungan dengan negara dan warga negara. Dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 No. 16 tahun 2009 tentang Perpajakan. Yang dimaksudkan dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara-negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengertian lain pajak menurut Resmi (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak dikemukakan menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Mardiasmo (2003: 1) sebagai berikut pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Soemitro dikutip Brotodiharjo (2003 :

6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dan ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat dan pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Definisi pajak menurut Soemitro (2009 : 1), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2011:12) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut : Jenis pajak provinsi terdiri dari : a.) Pajak Kendaraan Bermotor, b.) Bea balik nama kendaraan bermotor, c.) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d.) Pajak air permukaan ; dan e.) Pajak rokok. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari : a.) Pajak hotel, b.) Pajak restoran, 3.) Pajak hiburan, 4.) Pajak reklame, 5.) Pajak penerbangan jalan, 6.) Pajak mineral bukan logam dan bukan batuan, 7.) Pajak parkir, 8.) Pajak air tanah, 9.) Pajak sarang burung walet, 10.) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan, 11,) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Siahaan (2005 : 14) pendapatan daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan wewenang dan kemampuan daerah menggali sumber-sumber keuangan sendiri maka daerah

berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya. Demikian pula alternative cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat (DPR-RI).

Pendapatan daerah dalam arti sempit adalah perolehan dari lingkungan pemerintah daerah. Pendapatan daerah adalah suatu model dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dari pusat atau sumbangan (subsidi) kepada daerah dalam mendapatkan dana. Menurut Siahaan (2005 : 14) pendapatan daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan pungutan pendapatan daerah secara intensif, maka semua sumber-sumber penghasilan pendapatan daerah yang meliputi jenis pajak, jenis retribusi dan hasil dari perusahaan daerah tersebut semuanya telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai landasan hukum operasionalnya.

Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah memiliki keterkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB termasuk salah satu objek pajak yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan karena merupakan sumberpendapatan daerah.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Salah satu peran dari masyarakat tersebut adalah kontribusi sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah seperti PKB. Dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dan sifat masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis data yang digunakan yaitu: Data kualitatif adalah data berupa keterangan untuk menjelaskan angka-angka atau deskripsi mengenai angka-angka yang berhubungan dengan obyek penelitian (Sugiyono, 2012). Data kualitatif

dalam penelitian ini adalah berupa gambaran umum Provinsi NTB. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat dihitung dan diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010). Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini seperti data Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2017.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam arti data tersebut diperoleh dari sumber kedua. Data tersebut diperoleh instansi atau pihak yang mempunyai kaitan dan wewenang secara langsung (Sugiyono, 2012). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Analisis Data

Analisis regresi linier sederhana ini dipakai untuk mengetahui apakah terdapat arah hubungan yang positif atau negatif antara kedua variabel. Adapun model persamaan regresi sederhana yang dimaksudkan dalam analisis ini adalah seperti yang digambarkan oleh Sugiyono (2012) sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bx$$

dimana :

y = jumlah pendapatan daerah

x = jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor

a = konstanta

b = koefisien regresi

Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk menguji hipotesis yang diajukan penulis menggunakan uji koefisien regresi sederhana untuk mengetahui apakah variabel Independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Dependen (Y). uji hipotesis yang digunakan adalah uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa yang dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49%) dan luas pulau Lombok seluas 4.738,70 km² (23,51%).

Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Barat

Adapun data pajak kendaraan bermotor Provinsi NTB tahun 2008-2018 sebagai berikut :

Tabel 2
Data Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2018

Tahun	PKB	Persentase (%)
2008	88.679.141.800,00	-
2009	107.767.730.515,00	21,52
2010	121.518.483.332,00	12,75

2011	142.684.620.853,00	17,41
2012	165.096.438.321,00	15,70
2013	196.252.904.352,00	18,87
2014	218.000.606.343,00	11,08
2015	240.153.372.762,00	10,16
2016	269.187.973.631,00	12,09
2017	324.423.070.254,00	20,51
2018	389.092.415.685,00	19,93

Sumber : BAPPENDA NTB

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor pada tahun 2008 mencapai Rp.88.679.141.800,00 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp.107.767.730.515,00 dengan persentase 21,52%. Selanjutnya pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.121.518.483.332,00 dengan tingkat persentase 12,75%. Kemudian pada tahun 2011 PKB juga meningkat sebesar Rp.142.684.620.853,00 dengan tingkat persentase 17,41%. Selanjutnya diikuti dengan tahun 2012 yang data PKB nya juga meningkat menjadi Rp.165.096.438.321,00 dengan tingkat persentase 15,70%. Dan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp.196.252.904.352,00 dengan persentase 18,87%. Selanjutnya pada tahun 2014 pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi Rp.218.000.606.343,00 dengan persentase 11,08%. Kemudian pada tahun 2015 PKB meningkat sebesar Rp.240.153.372.762,00 dengan persentase 10,16% dan untuk tahun 2016 meningkat menjadi Rp.269.187.973.631,00 dengan persentase 12,09%. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.324.423.070.254,00 dengan persentase 20,51%. Kemudian pada tahun 2018 PKB meningkat menjadi Rp.389.092.415.685,00 dengan persentase 19,93%.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Adapun data perkembangan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008-2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2008-2018

Tahun	PAD	Persentase (%)
2008	413.161.193.104,66	-
2009	471.526.319.515,98	14,12%
2010	515.340.956.845,65	9,29%
2011	741.291.174.995,39	43,84%
2012	745.979.866.410,64	0,63%
2013	858.154.094.987,46	15,03%
2014	1.115.060.397.173,45	29,93%
2015	1.372.661.567.125,26	23,10%
2016	1.359.844.019.437,97	-0,93%
2017	1.684.468.709.593,04	23,87%
2018	1.660.300.469.939,07	-1,43%

Sumber : BAPPENDA NTB

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 data pendapatan asli daerah provinsi NTB mencapai Rp. 413.161.193.104,66 dan dilanjutkan dengan tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 471.526.319.515,98 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,12%. Selanjutnya pada tahun 2010 kembali meningkat dengan jumlah Rp.515.340.956.845,65 dengan tingkat pertumbuhan 9,29%. Kemudian pada tahun 2011 peningkatan PAD cukup besar dengan jumlah yaitu Rp.741.291.174.995,39 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 43,84%. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali meningkat dengan jumlah mencapai Rp.745.979.866.410,64 dengan tingkat pertumbuhan yaitu 0,63% dan diikuti tahun 2013 meningkat dengan jumlah Rp.858.154.094.987,46 dan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 15,03%. Kemudian pada tahun 2014 PAD meningkat menjadi Rp.1.115.060.397.173,45 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 29,93%. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali meningkat dengan angka Rp.1.372.661.567.125,26 dengan tingkat pertumbuhan yaitu 23,10%. Kemudian untuk tahun 2016 jumlah PAD menurun menjadi Rp.1.359.844.019.437,97 yang tingkat pertumbuhannya menurun menjadi -0,93%. Dan untuk tahun 2017 PAD provinsi NTB kembali meningkat menjadi Rp.1.684.468.709.593,04 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 23,87% dan untuk tahun terakhir yaitu tahun 2018 pendapatan asli daerah Provinsi NTB kembali menurun yaitu dengan angka Rp.1.660.300.469.939,07 yang pertumbuhannya dengan angka -1,43%. Penurunan angka PAD yang terjadi pada tahun 2016 dan 2018 dikarenakan turunnya jumlah kendaraan bermotor yang disebabkan adanya penghapusan objek pajak. Seperti adanya kendaraan yang hilang, kendaraan rusak, kendaraan tua dan bahkan adanya kendaraan yang pindah keluar NTB.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya adalah untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan analisis staitistik yaitu model analisis regresi linier sederhana. Untuk memudahkan perhitungan model analisis tersebut digunakan program SPSS for Windows (23.0).

Tabel 4 Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5551854013,648	92288199874,921		,060	,953
PKB	4,807	,411	,969	11,696	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui konstanta $a = 5.551.854.013,648$ dan koefisien regresi $b = 4,807$ sehingga diperoleh model persamaan regresi sederhana dimana $Y = a + bx$ berdasarkan hasil perhitungan maka persamaan sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (Y)} = 5.551.854.013,648 + 4,807\text{PKB}$$

Keterangan :

$$a = 5.551.854.013,648$$

$$b = 4,807$$

Konstanta $a = 5.551.854.013,648$ artinya secara rata-rata jika tidak ada perubahan pada variabel bebas (PKB), maka variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) tetap sebesar Rp. 5.551.854.013,648 miliar. Nilai konstanta tersebut menginterpretasikan bahwa tanpa pengaruh variabel PKB, Pendapatan Asli Daerah tetap sebesar Rp. 5.551.854.013,648. $b = 4,807$ artinya jika PKB Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar Rp 1, maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB akan mengalami peningkatan sebesar Rp.4.807 miliar dengan asumsi faktor lainnya tetap.

Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk mengetahui model regresi sederhana diatas layak digunakan atau tidak, maka digunakan uji statistic uji-t.

Adapun hasil dari program SPSS Uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.5 Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5551854013,648	92288199874,921		,060	,953
PKB	4,807	,411	,969	11,696	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Lampiran 5

Tingkat signifikan pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dari hasil perhitungan data dengan SPSS diperoleh t-hitung untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X) adalah 11,696 dengan nilai signifikan 0,000 dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat derajat kebebasan ($df = n - k$), $df = 11 - 2 = 9$ pada $\alpha = 5\%$ (0,05) adalah 1,833. Apabila nilai t-hitung sebesar 11,696 dibandingkan dengan nilai t-tabel 1,833 maka nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel ($t\text{-hitung } 11,696 > t\text{-tabel } 1,833$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai perbandingan antara nilai signifikan yang dicapai sebesar 0,000 yang berarti tingkat kesalahan lebih kecil dari 0,005 (5%). Dengan demikian Pajak Kendaraan Bermotor (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi NTB 2008 sampai dengan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi NTB. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian H_0 ditolak dan H_a diterima yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2018.

Hasil analisis regresi linier sederhana memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (Y) = $5.551.854.013,648 + 4,807 \text{PKB}$ Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimana $a = (5.551.854.013,648)$ artinya secara rata-rata jika tidak ada perubahan pada variabel bebas (PKB), maka variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) tetap sebesar Rp. 5.551.854.013,648 miliar. Nilai konstanta tersebut menginterpretasikan bahwa tanpa pengaruh variabel PKB, Pendapatan Asli Daerah tetap sebesar Rp. 5.551.854.013,648. $b = 4,807$ artinya jika PKB Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar Rp 1, maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.807 miliar dengan asumsi faktor lainnya tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) ini karena Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB dipengaruhi oleh Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi NTB. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Pajak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) ini karena Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB dipengaruhi oleh Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi NTB.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan di muka, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, berdasarkan hasil analisis bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi NTB 2008 sampai dengan 2018 dengan nilai koefisien positif.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Bagi BAPPENDA
Semua fasilitas pelayanan yang disediakan sudah sangat baik tapi masih perlu upaya yang lebih maksimal lagi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Bagi Masyarakat
Bagi Masyarakat (Khususnya Wajib Pajak) agar lebih menaati peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor mengingat fasilitas pelayanan yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB seperti Kantor Induk Samsat Keliling, e-Samsat melalui Bank NTB, hingga yang terbaru samsat On Call sebagai bentuk usaha

untuk melayani wajib pajak yang telah tersedia di kantor cabang yang berada di masing-masing wilayah.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar J, Khaeril 2014. *Analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah propinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Semarang <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8838>. Diakses 2 April 2019.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA), 2019. *Data Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2005-2017*. Mataram
- Badan Pusat Statistik: *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka (Beberapa Edisi)*, BPS, Nusa Tenggara Barat
- Djojohadikusumo, Soemitro. 2003. *Teori Perpajakan*. Bogor: Grasindo.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi Siti. 2007. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rompis, Natalia, Ester. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Ruma, Zainal. 2013. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar*. Jurnal Economic Volume 1. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Siahaan, P. Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Bisnis Edisi 1*, Bandung : Alfabeta
- 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia I, 9E*. Penerbit Salemba Empat.
- Winarso, Widi. 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor CP DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II)*. Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT). Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika. Jakarta.